

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Pj Gubernur Ganti Sekda dan Direksi BUMD, Berikutnya?

◆ MTZ : Cari yang Visinya Sama dengan Beliau

JAKARTA (Poskota) - Baru dua bulan menduduki posisinya, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sudah getol melakukan perombakan. Setelah beberapa nama direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dicopot, dan digantinya Sekretaris Daerah (sekda) Marullah Matali, akhirnya berbagai komentar muncul.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) yang menilai, kebijakan yang dibuat Heru sudah melebihi wewenangnya sebagai Pj Gubernur. "Memang agak rancu sekarang ini hak dan wewenang seorang Pj. Kan yang namanya Pj itu bukan gubernur yang dipilih masyarakat lewat proses demokratis," katanya saat

dikonfirmasi wartawan, Minggu (4/12).

Menurut MTZ, Pj Heru seharusnya tak bisa punya kewenangan sebesar gubernur definitif yang dipilih langsung oleh masyarakat. "Ini kayaknya sudah terlanjur seperti ini. Jadi ada Pj gubernur yang diangkat oleh presiden, bukan dipilih oleh rakyat. Ya nikmat saja," ujarnya.

MTZ menambahkan, dirinya menduga ada kongkalikong antara Heru dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pergeseran Marullah Matali dari Sekda DKI. Pasalnya, jabatan itu tak bisa sembarangan digeser bila tak ada restu dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Kemendagri. "Mungkin sudah izin Mendagri (untuk geser Marullah), kalau memang belum izin har-

usnya Mendagri menegurdong," kata dia.

Walau demikian, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengaku tak heran dengan perombakan jajaran yang terjadi di era Pj Gubernur Heru Budi. "Itu memang Pj gubernur punya kebijakan, karena itu kan untuk bantu dia. Jadi, cari yang visinya dengan beliau, kan gitu ya," tutumnya.

Anak Betawi Kecewa

Selain itu Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni juga memberi komentar terkait dicopotnya Marullah yang kini menduduki kursi Deputy Gubernur. "Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus

ada etika. Saya tersinggung," ujarnya.

Selama ini, menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI itu, masyarakat Betawi selalu berdamping hidup rukun tanpa ada ketegangan. Apalagi, sejak Gubernur Joko Widodo, Basuki T. Purnama, Djarot, hingga Anies Baswardan, yang menjabat sebagai Sekda DKI selalu putra asli daerah (Betawi). "Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan UUS Pj Sekda itu tak beretika," tuturnya.

Apalagi, lanjut penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI itu, Heru tidak dipilih secara langsung dia hanya ditunjuk Presiden sebagai Pj. Alasan apapun, ditegaskan Ghoni,

sebagai anak Betawi enggak bisa menerima pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekda DKI. Karena ini merupakan penghinaan bagi warha Betawi. "Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Sekda dengan Pelaksana tugas (Plt). Rusak, ucapnya." tegasnya

Lebih lanjut, Legislator Kebon sirih ini menambahkan, Gubernur Anies Baswardan lebih menghargai masyarakat Betawi ketimbang Heru. Sebab, sejak dilantik sebagai gubernur 2017 Sekda selalu putra Betawi. Dan sebelum Marullah Matali, almarhum Saefullah Sekda DKI anak Betawi. Penggantinya, juga putra asli Jakarta. "Heru ini tidak perhatian dengan masyarakat Betawi," tandas dia. **(Aldi/ln)**